



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020
Nomor: 03/PENG/PIM/RH.04.01/07/2020

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung dan Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 462/PIM/RH.01/07/2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung RI Tahun 2020, Komisi Yudisial mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mengusulkan warga negara terbaik menjadi Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
5. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
6. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela;
7. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Hukum;
8. berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
9. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan
12. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial.

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dilakukan secara **online** melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai tanggal **10 Juli s.d. 30 Juli 2020**. Berkas pendaftaran yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung
2. Surat pengusulan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau organisasi pengusaha Indonesia;
3. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi dibuat di atas kertas bermeterai;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. Fotokopi ijazah S1 Hukum beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun dibuat di atas kertas bermeterai dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja/sertifikat/bukti terkait;
8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat;
9. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi calon;
10. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus serta anggota partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik dibuat di atas kertas bermeterai;
11. Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
13. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial dibuat di atas kertas bermeterai; dan
14. Pasphoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Berkas terkait persyaratan disertai **softcopy** berkas yang dipindai ke dalam format PDF dan disimpan di media **flash disk/DVD dimasukkan dalam map plastik untuk selanjutnya dikirim melalui pos** ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- **paling lambat tanggal 30 Juli 2020 (cap pos)**.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran **online** dan proses seleksi dapat disampaikan melalui **call center** Komisi Yudisial '187' atau alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau fasilitas **chat online** di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id;
2. Berkas pendaftaran yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
6. Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2020

Ketua,
ttd

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.